KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Komisi I DPR Semangati Menkeu Kejar Pajak Google
Tanggal : Senin, 10 Oktober 2016
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Komisi I DPR Semangati Menkeu Kejar Pajak Google

ANGGOTA Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mendorong Menteri Keuangan Sri Mulyani mengejar perusahaan teknologi informasi Google hingga memenuhi kewajibannya membayar pajak di Indonesia.

"Saya optimistis Menkeu bisa mengejar Google, Youtube, Facebook dan perusahaan media sosial multinasional apapun yang mengeruk keuntungan banyak dari penggunanya di Indonesia," kata Syaifullah di Jakarta, kemarin.

Wakil Ketua Fraksi PPP MPR ini menyarankan, pemerintah memblokir situs Google dan Facebook dan media sosial multinasional, apabila tidak juga mau memenuhi tanggung jawab membayar pajak kepada pemerintah Indonesia.

"Blokir saja Google kalau nggak mau bayar. Kita bikin seperti China dan Jepang saja dengan membuat situs pencarian made in Indonesia. Di China ada Alibaba, Google diblokir," sarannya.

Syaifullah menilai, pajak dari perusahaan teknologi informasi multinasional sangat strategis. Terlebih, aset dan modal yang dimiliki perusahaan tersebut memiliki nilai hingga ribuan triliun.

"Masak bayar pajak di Indonesia keluarin beberapa triliun saja nggak mau. Google, Facebook itu market terbanyak salah satunya kan di Indonesia, mereka bisa meraup keuntungan dari iklan dan promo dari rakyat Indonesia," ujarnya.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen menambahkan, pajak dari sektor teknologi informasi bisa sangat membantu pemerintah menghasilkan dana segar untuk modal pembangunan.

"Perusahaan asing jangan mau ambil market kita saja, tapi nggak mau bayar pajak. Pemerintah harus kreatif mengejar perusahaan-perusahaan besar," cetusnya.

Syaifullah mengusulkan, Google, Facebook dan Youtube diikutsertakan dalam program Tax Amnesty saja apabila selalu mengelak untuk diperiksa mengenai perpajakan oleh Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

"Kalau minta keringanan pajak bolehlah, yang penting perusahaan multinasional punya iktikad baik. Pokoknya pemerintah kejar itu Google sama dapat," imbaunya.

Diketahui, Google Asia Pacific Pte Ltd saat ini masih menjadi bidikan pemerintah. Pasalnya, hingga saat ini Google masih tak bersedia untuk diperiksa mengenai perpajakan. Ditjen Pajak, hingga saat ini masih terus berupa melakukan proses penyidikan terkait kewajiban Google membayar pajak. ■ ONI